

DAFTAR KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

The Most Frequently Used

Berdasarkan: PER-38/PJ/2009, PER-23/PJ/2010, PER-24/PJ/2013, PER-30/PJ/2015, PER-44/PJ/2015, PER-06/PJ/2016, PER-22/PJ/2017



1. PPh Pasal 21
Kode Akun Pajak: 411121
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 21
 - 300 : STP PPh Pasal 21
 - 310 : SKPKB PPh Pasal 21
 - 401 : PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
 - 402 : PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya
2. PPh Pasal 22
Kode Akun Pajak: 411122
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 22
 - 300 : STP PPh Pasal 22
 - 310 : SKPKB PPh Pasal 22
 - 900 : Pemungut PPh Pasal 22 Non-Bendaharawan
 - 910 : Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN
 - 920 : Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD
 - 930 : Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa
3. PPh Pasal 22 Impor
Kode Akun Pajak: 411123
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 22 Impor
 - 300 : STP PPh Pasal 22 Impor
 - 310 : SKPKB PPh Pasal 22 Impor
4. PPh Pasal 23
Kode Akun Pajak: 411124
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 23
 - 101 : PPh Pasal 23 atas Dividen
 - 102 : PPh Pasal 23 atas Bunga
 - 103 : PPh Pasal 23 atas Royalti
 - 104 : PPh Pasal 23 atas Jasa
 - 300 : STP PPh Pasal 23
 - 301 : STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
 - 310 : SKPKB PPh Pasal 23
 - 311 : SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
Kode Akun Pajak: 411125
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
 - 101 : Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
 - 200 : Tahunan PPh Orang Pribadi
 - 300 : STP PPh Orang Pribadi
 - 310 : SKPKB PPh Orang Pribadi
6. PPh Pasal 25/29 Badan
Kode Akun Pajak: 411126
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 25 Badan
 - 200 : Tahunan PPh Badan
 - 300 : STP PPh Badan
 - 310 : SKPKB PPh Badan
7. PPh Pasal 26
Kode Akun Pajak: 411127
Kode Jenis Setoran:
 - 100 : Masa PPh Pasal 26
 - 101 : PPh Pasal 26 atas Dividen
 - 102 : PPh Pasal 26 atas Bunga
 - 103 : PPh Pasal 26 atas Royalti
 - 104 : PPh Pasal 26 atas Jasa
 - 105 : PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT
 - 300 : STP PPh Pasal 26
 - 301 : STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
 - 310 : SKPKB PPh Pasal 26
 - 311 : SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
8. PPh Final
Kode Akun Pajak: 411128
Kode Jenis Setoran:
 - 300 : STP PPh Final
 - 310 : SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
 - 311 : SKPKB PPh Final Pasal 15

312 : SKPKB PPh Final Pasal 19
 401 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
 402 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
 403 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
 404 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI
 405 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
 406 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa
 407 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri
 408 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
 409 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
 410 : PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
 411 : PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
 413 : PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
 414 : PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
 415 : PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT
 416 : PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
 417 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
 418 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
 419 : PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen
 420 : PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013 atau PP 23/ 2018 atau PPh Final UMKM)
 421 : PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di Bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
 499 : PPh Final Lainnya

9. PPN Dalam Negeri

Kode Akun Pajak:

Kode Jenis Setoran:

411211
 100 : Setoran Masa PPN Dalam Negeri
 101 : Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
 102 : Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean
 103 : Setoran Kegiatan Membangun Sendiri
 105 : Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar
 300 : STP PPN Dalam Negeri
 310 : SKPKB PPN Dalam Negeri
 311 : SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
 312 : SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
 313 : SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri
 314 : SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri
 900 : Pemungut PPN Dalam Negeri Non-Bendaharawan
 910 : Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN
 920 : Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD
 930 : Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa

10. PPN Impor

Kode Akun Pajak:

Kode Jenis Setoran:

411212
 100 : Setoran Masa PPN Impor
 300 : STP PPN Impor
 310 : SKPKB PPN Impor
 900 : Pemungut PPN Impor Non-Bendaharawan
 910 : Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBN
 920 : Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD
 930 : Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dana Desa

11. PPnBM Dalam Negeri

Kode Akun Pajak:

Kode Jenis Setoran:

411221
 100 : Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri
 300 : STP PPnBM Dalam Negeri
 310 : SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri
 311 : SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri
 900 : Pemungut PPnBM Dalam Negeri Non-Bendaharawan
 910 : Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBN
 920 : Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan APBD
 930 : Pemungut PPnBM Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa

12. PPnBM Impor

Kode Akun Pajak:

Kode Jenis Setoran:

411222
 100 : Setoran Masa PPnBM Impor
 300 : STP PPnBM Impor
 310 : SKPKB PPnBM Impor
 900 : Pemungut PPnBM Impor Non-Bendaharawan
 910 : Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBN
 920 : Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan APBD
 930 : Pemungut PPnBM Impor Bendaharawan Dana Desa

Daftar Kode Harta dan Utang:

Kas dan Setara Kas:	
011	: Uang tunai
012	: Tabungan
013	: Giro
014	: Deposito
019	: setara kas lainnya
Piutang:	
021	: Piutang
022	: piutang afiliasi (piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
029	: piutang lainnya
Investasi:	
031	: saham yang dibeli untuk dijual kembali
032	: Saham
033	: obligasi perusahaan
034	: obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
035	: surat utang lainnya
036	: reksadana
037	: Instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)
038	: penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
039	: Investasi lainnya
Alat Transportasi:	
041	: sepeda
042	: sepeda motor
043	: mobil
049	: alat transportasi lainnya
Harta Bergerak Lainnya:	
051	: logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052	: batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053	: barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
054	: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
055	: peralatan elektronik, furnitur
059	: harta bergerak lainnya
Harta Tidak Bergerak	
061	: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
062	: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063	: tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069	: harta tidak gerak lainnya
Daftar Kode Utang:	
101	: Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
102	: Kartu Kredit
103	: Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
109	: Utang Lainnya

Status Perpajakan Suami-Isteri

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri sebagai berikut:

- KK** yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
- HB** yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami-isteri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- PH** yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- MT** yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Dalam hal isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-isteri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh isteri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – III (Formulir 1770 - III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 15: Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja.